



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TIDORE

Jalan Mayor Daud, Kel. Dowora Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan

Website: www.bapastidore.kemenkumham.go.id Email: bps.tidore@kemenkumham.go.id

**LAPORAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA DI
LINGKUNGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TIDORE**

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik (*Good Government*) adalah cerminan birokrasi yang ada di suatu negara. Reformasi birokrasi diperlukan agar pemerintahan bisa menerapkan suatu sistem yang efektif dan efisien sehingga pelayanan yang prima dan tepat sasaran dapat diberikan. Sejalan dengan itu maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

Perwujudan dari reformasi birokrasi tertuangkan dalam perjanjian kinerja yang ada di setiap unit pelaksanaan teknis yang ada di lingkungan pemerintahan. Perjanjian kinerja ini menjadi tolak ukur terhadap apa yang akan dijalankan oleh UPT terkait. Jika lebih dirincikan lagi maka ada rencana aksi dan data dukung dalam setiap sasaran kegiatan yang ada di perjanjian kinerja. Rencana aksi perlu diuraikan agar setiap sasaran kegiatan dalam perjanjian kinerja bisa terlaksana sesuai target yang ada sehingga layanan yang prima dan maksimal bisa diberikan kepada masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuannya adalah Untuk mendorong terlaksananya sasaran kegiatan yang ada di perjanjian kinerja melalui penyusunan rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup rencana aksi perjanjian Kinerja di Balai Pemasarakatan Kelas II Tidore tahun 2024

IV. DASAR

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Tidore Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Maluku Utara

V. HASIL TINDAK LANJUT DAN RENCANA AKSI

RENCANA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN			
1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	70%		Memberikan bimbingan yang sesuai dengan minat dan bakat Klien Pemasyarakatan	Rp. 1.742.084.000	Rp.706.736.736	Rp. 228.354.445 (data ditarik pada tanggal 27 Februari 2024)	TW I Bimbingan Keprabdian dan Kemandirian	TW I TW II TW III TW IV	Salinan PKS dengan Pokmas Lipas					
		Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%		Bekerjasama dengan Instansi terkait sehingga bisa menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan rekomendasi diluar putusan pidana penjara serta mengupayakan diversifikasi untuk kasus yang bisa di diversikan	Rp. 1.742.084.000	Rp.706.736.736	Rp. 228.354.445 (data ditarik pada tanggal 27 Februari 2024)	TW I	Bekerjasama dengan Dinsos, Depag serta instansi terkait	TW I TW II TW III	Salinan PKS dengan Dinsos, Depag dan instansi terkait				
									TW II	Meningkatkan Sinergisitas dengan Instansi-instansi yang berkaitan dengan Diversi seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri	TW IV	Dokumentasi mengikuti Forkopimda				
									TW III							
		Persentase klien Anak yang terpenuhi Hak Pendidikannya	40%		Memfasilitasi klien anak agar terpenuhi hak pendidikannya	Rp. 1.742.084.000	Rp.706.736.736	Rp. 228.354.445 (data ditarik pada tanggal 27 Februari 2024)	TW I	Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan	TW I TW II TW III TW IV	Salinan PKS dengan Dinas Pendidikan				
									TW II							
									TW III							
		2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan Hunian	100%		Meningkatkan Sinergisitas dengan instansi terkait dan melakukan pengawasan dari hasil rekomendasi bimbingan pada WBP	Rp. 1.742.084.000	Rp.706.736.736	Rp. 228.354.445 (data ditarik pada tanggal 27 Februari 2024)	TW I	Bekerjasama dengan Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan	TW I TW II TW III TW IV	Dokumentasi kegiatan pengawasan dari hasil rekomendasi bimbingan		
											TW II					
											TW III					
											TW IV					
			Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dokumen		Menyusun dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel	Rp. 1.742.084.000	Rp.706.736.736	Rp. 228.354.445 (data ditarik pada tanggal 27 Februari 2024)	TW I	Menyusun dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	TW I TW II TW III TW IV	Dokumen Rencana Kerja, Dokumen Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporannya		
TW II																
TW III																
TW IV																
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan			1 Dokumen		Menyusun dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Rp. 1.742.084.000	Rp.706.736.736	Rp. 228.354.445 (data ditarik pada tanggal 27 Februari 2024)	TW I	Menyusun dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan Tepat waktu	TW I TW II TW III TW IV	Dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan			
										TW II						
										TW III						
										TW IV						
	Terpenuhinya data dan peningkatan					Menyusun data dan peningkatan kompetensi	Rp. 1.742.084.000	Rp.706.736.736	Rp. 228.354.445 (data ditarik pada tanggal 27 Februari 2024)	TW I	Menyusun data dan peningkatan kompetensi apa	TW I TW II	Dokumen pengelolaan			
										TW II						

3		kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Dokumen	pegawai kemasyarakatan	Rp. 1.742.084.000			TW III	saja yang telah dijalani oleh pegawai kemasyarakatan	TW III		BMN dan Kenurah tanggaan		
								TW IV						
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen	Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel	Rp. 1.742.084.000	Rp. 706.736.736	Rp. 228.354.445 (data ditarik pada tanggal 27 Februari 2024)	TW I	Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel setiap bulannya agar tidak menumpuk dan bisa selesai dengan tepat waktu	TW I		Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel		
								TW II						
								TW III						
								TW IV						
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Meningkatkan Layanan yang ada di Balai Pemasyarakatan	Rp. 1.742.084.000	Rp. 706.736.736	Rp. 228.354.445 (data ditarik pada tanggal 27 Februari 2024)	TW I	Menyusun program-program untuk meningkatkan layanan yang ada di Balai Pemasyarakatan	TW I		Dokumentasi kegiatan-Kegiatan peningkatan pelayanan di Balai Pemasyarakatan		
								TW II						
								TW III						
								TW IV						
		Jumlah Kendaraan Bermotor	1 Unit	Perbaikan Kendaraan Bermotor secara berkala	Rp. 1.742.084.000	Rp. 706.736.736	Rp. 228.354.445 (data ditarik pada tanggal 27 Februari 2024)	TW I	Melakukan perbaikan Kendaraan motor secara berkala	TW I		Dokumentasi dan Kwitansi perbaikan kendaraan bermotor secara berkala		
								TW II						
								TW III						
								TW IV						
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	7 Unit	Pendataan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp. 1.742.084.000	Rp. 706.736.736	Rp. 228.354.445 (data ditarik pada tanggal 27 Februari 2024)	TW I	Melakukan Pendataan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	TW I		Dokumen pendataan pengolah data dan komunikasi		
								TW II						
								TW III						
								TW IV						
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	14 Unit	Pendataan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp. 1.742.084.000	Rp. 706.736.736	Rp. 228.354.445 (data ditarik pada tanggal 27 Februari 2024)	TW I	Melakukan Pendataan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	TW I		Dokumen pendataan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		
								TW II						
								TW III						
								TW IV						
		Jumlah Gedung/Bangunan	900 M	Pemeliharaan Gedung/Bangunan	Rp. 1.742.084.000	Rp. 706.736.736	Rp. 228.354.445 (data ditarik pada tanggal 27 Februari 2024)	TW I	Melakukan Pemeliharaan Gedung/Bangunan	TW I		Dokumentasi dan kwitansi Pemeliharaan Gedung/Bangunan		
								TW II						
							TW III							
							TW IV							

VI. KESIMPUNAN

Bahwa pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja pada Balai Pemasarakatan Kelas II Tidore sekaligus bertujuan mencapai peningkatan pelayanan publik di Lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II Tidore

VII. PENUTUP

Demikian laporan penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II Tidore atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Tidore, 27 Februari 2024



Apriyani, S.E., M.H

NIP. 19840401 200501 2 001